



**PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PASAL 156 a KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA TENTANG TINDAK PIDANA
PENODAAN AGAMA
(Tinjauan Terhadap Perkara Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/Pn.Mdn)**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2024**

**PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PASAL 156 a
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG TINDAK PIDANA
PENODAAN AGAMA
(Tinjauan Terhadap Perkara Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/Pn.Mdn)**

(Adinda Faradilla Mursalin, NIM 2220112046, Program Studi Magister Hukum
Universitas Andalas, 141 Halaman, 2024)

ABSTRAK

Tindak pidana penodaan agama yang diatur dalam Pasal 156 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seringkali memicu permasalahan baik dalam sosial dan polarisasi di masyarakat bahkan menjadi sorotan karena interpretasi yang beragam dan menimbulkan perdebatan serta kriminalisasi. Salah satu kasus yang pernah terjadi sehingga menimbulkan pro dan kontra yaitu terdapat dalam Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/Pn.Mdn dengan terdakwa yang bernama Meliana. Kasus di dalam putusan ini berawal dari pernyataan Meliana yang dianggap menghina agama Islam terkait adzan dilingkungan tempat tinggalnya. Tindakan menimbulkan kemarahan di masyarakat sekitar dan akhirnya mengarah pada tindakan hukum yang serius. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan melakukan penafsiran secara mendalam untuk mengkaji ketidakjelasan dalam rumusan pasal tersebut terkait batasan “permusuhan,” ”penyalahgunaan” dan “penodaan.” Dengan adanya ketidakjelasan tersebut maka dalam penelitian ini akan dilakukan 1. Bagaimana penafsiran hukum terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama dalam Konteks Undang-Undang Penodaan Agama, 2. Bagaimana Interpretasi Hukum Terhadap Konsep Penodaan Agama Dalam Pasal 156 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan 3. Bagaimana Penafsiran Oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1612/Pid.B/2018/Pn.Mdn. Metode penelitian yang digunakan ialah metode normatif. Metode normatif merupakan pendekatan yang berfokus pada aturan, prinsip, dan norma hukum tertulis yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Metode ini menganalisis dan menafsirkan teks hukum seperti undang-undang, peraturan, yurisprudensi, dan doktrin hukum untuk mencari solusi terhadap permasalahan hukum. Hasil dalam penelitian ini yaitu perlunya peninjauan ulang dan reformasi terhadap Pasal 156 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini dalam penafsiran hukum agar lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip keadilan yang dinamis, sedangkan dalam pengadilan atas putusan sanksi pidananya yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidaklah sesuai dengan substansi hukum yang terdapat dalam Pasal 156 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sanksi yang diancamkan adalah sanksi yang tindakannya bersifat administratif dan sanksi pidana berupa pidana penjara, yang dapat dilihat bahwasannya Undang-Undang Penodaan Agama yaitu Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama serta Pasal 156 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai *double track system*. Maka dari itu dilakukan penafsiran hukum yang lebih spesifik, guna penerapan yang adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci: Penafsiran Hukum, Penistaan Agama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

LEGAL INTERPRETATION OF ARTICLE 156 a OF THE CRIMINAL CODE ON THE CRIMINAL ACTS OF BLASHEMY LAW

(Adinda Faradilla Mursalin, NIM 2220112046, Program Study Master Of Law Andalas University, 141 Pages, 2024)

ABSTRACT

The criminal offense of religious defamation regulated under Article 156a of the Indonesian Criminal Code often triggers issues related to social polarization in society and has become a focal point due to varied interpretations, leading to debates and criminalization. One notable case that sparked significant controversy is the Verdict Number 1612/Pid.B/2018/Pn.Mdn involving a defendant named Meliana. This case began with Meliana's statement, which was deemed insulting to Islam regarding the call to prayer in her residential area. Her actions provoked outrage among the local community and ultimately led to serious legal consequences. This research aims to analyze and conduct an in-depth interpretation to address the ambiguity in the article's formulation concerning the definitions of "hostility," "abuse," and "defamation." Given this lack of clarity, the study will focus on the following questions: 1. What is the legal interpretation of the criminal offense of religious defamation in the context of the Law on Religious Defamation? 2. How is the legal interpretation of the concept of religious defamation in Article 156a of the Criminal Code understood? and 3. How did the judge interpret the criminal offense of religious defamation in the Medan District Court Verdict Number 1612/Pid.B/2018/Pn.Mdn? The research employs a normative method, which focuses on the written laws, principles, and norms applicable within a legal system. This method analyzes and interprets legal texts such as laws, regulations, jurisprudence, and legal doctrines to seek solutions to legal problems. The findings of this research indicate the need for a review and reform of Article 156a of the Criminal Code concerning legal interpretation, ensuring it aligns more closely with societal developments and dynamic principles of justice. Furthermore, the court's decision regarding the imposed criminal sanctions on the defendant does not align with the substantive law in Article 156a of the Criminal Code. The penalties imposed include both administrative sanctions and imprisonment, which highlights that the Law on Religious Defamation, specifically Law Number 1/PNPS of 1965 concerning the Prevention of Abuse and/or Religious Defamation, along with Article 156a of the Criminal Code, represents a double track system. Therefore, a more specific legal interpretation is necessary to ensure fair application in accordance with human rights principles.

Keywords: *Legal Interpretation, Blasphemous Law, Criminal Code (KUHP)*